

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN JASA
PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI**

**Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional
Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja**

Untuk Mendukung Proyek

***Labor Market Information and Skills System Transformation
for Labor Market Flexibility Project (LISTRAF)***

**PROJECT MANAGEMENT UNIT
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI (PPA)
SUB KOMPONEN B.2.5 PENINGKATAN SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA NASIONAL BERBASIS SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

A. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang kompleks, ditandai oleh sejumlah tantangan signifikan. Beberapa di antaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta kualitas pendidikan dan pelatihan yang belum merata. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu akar permasalahan pengangguran di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang *reliable*. Kondisi yang demikian tentu tidaklah ideal bagi Indonesia, mengingat pasar tenaga kerja yang fleksibel mutlak membutuhkan SIPK yang andal sebagai instrumen untuk mengelola arus mobilitas tenaga kerja yang menjadi lebih cair dan dinamis.

Pemecahan masalah ketenagakerjaan menjadi semakin penting mengingat dalam Perpres 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diamanatkan sejumlah target strategis antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2029: 4 – 4,71 % dan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja pada tahun 2029: 3,9 %.

Keberhasilan pencapaian-pencapaian target nasional di bidang ketenagakerjaan tersebut, sangatlah tergantung pada SIPK. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan proyek *Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility* (LISTRAF). Tujuan Pembangunan Proyek LISTRAF ini yaitu meningkatkan akses dan efektivitas pengembangan keterampilan dan layanan ketenagakerjaan bagi penduduk usia kerja, dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pasar kerja (*hardware* dan *software*) dan pengembangan kelembagaan layanan pasar kerja. Kedua upaya ini diharapkan akan menghasilkan perluasan akses layanan informasi pasar kerja (baik yang mobile maupun yang non-mobile) dan pengembangan keterampilan kerja. Proyek LISTRAF dengan *No. Loan* 9636-ID ini merupakan proyek pinjaman luar negeri yang bersumber dari World Bank. Proyek ini

akan dijalankan selama 4 (empat) tahun yaitu 2024-2027 dan memiliki indikator keberhasilan:

1. Jumlah pengguna yang membuat profil di SIAPKerja (terpilah berdasarkan jenis kelamin).
2. Kenaikan persentase jumlah pencocokan kerja yang berhasil di SIAPKerja (pelamar masuk daftar pilihan) (terpilah berdasarkan jenis kelamin).
3. Jumlah siswa yang terdaftar di BPVP secara kumulatif (terpilah berdasarkan jenis kelamin).
4. Persentase lulusan BPVP yang bekerja (dalam 6 bulan setelah lulus) (terpilah berdasarkan jenis kelamin).

Proyek LISTRAF terdiri dari 3 (tiga) komponen, Komponen 1 Pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Andal, Komponen 2 Pemanfaatan informasi pasar kerja untuk mempromosikan ekosistem pelatihan yang berkualitas tinggi, terintegrasi, dan ramah iklim, Komponen 3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Proyek. Pada komponen 2 terdiri dari 5 sub komponen, B.2.1 Pengembangan Pedoman Standar dan SOP Strategi Transformasi BPVP / Penguatan Kelembagaan, B.2.2 Pelatihan dan dukungan berkelanjutan mengenai SOP bagi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, BPVP B.2.3 Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan berbasis Pekerjaan Hijau dan Pekerjaan Masa Depan, B.2.4 Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap forum Lembaga Pelatihan Kerja dengan industri, untuk memperkuat metode pelatihan, program magang, dan kesesuaian dengan permintaan pasar tenaga kerja dan **B.2.5 Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja.**

Sertifikasi kompetensi kerja adalah pengakuan formal terhadap kompetensi tenaga kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan/atau pengalaman kerja yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi BNSP. Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2022, Sekretariat BNSP sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas merupakan unsur pendukung bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada BNSP.

Dalam kerangka ini, BNSP bersama Sekretariat BNSP berperan aktif dalam mengembangkan dan menyempurnakan sistem sertifikasi berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja agar selaras dengan standar kompetensi kerja dan kebutuhan pasar kerja. Dalam rangka memperkuat sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang

adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, dilakukan serangkaian kegiatan strategis yang mencakup pelatihan asesor kompetensi bagi instruktur LSP Pihak kedua (LSP-P2) Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, pelatihan peningkatan kompetensi dan sertifikasi ulang asesor melalui mekanisme *Recognition of Current Competency* (RCC), serta pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola LSP P2 untuk memastikan tata kelola sertifikasi berjalan profesional dan akuntabel. Selain itu, diselenggarakan pelatihan Kaji Ulang Materi Uji Kompetensi untuk sektor prioritas pembangunan nasional, sektor *emerging* dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan di masa datang.

Seluruh kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja akan dilaksanakan melalui perusahaan pengelola administrasi (PPA) untuk meningkatkan efisiensi, dan transparansi pengelolaan kegiatan dan layanan yang akuntabel. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Perusahaan Pengelola Administrasi Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189)
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak, Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja Dan Sertifikasi

5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja Dan Sertifikasi
6. Petunjuk Teknis Program Pelatihan Dan Sertifikasi Asesor Kompetensi Dalam Pengembangan Sistem Dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi (Revisi-I) No: 1/Juknis-Askom/V/2025

C. TUJUAN PROGRAM

1. Tujuan Pelatihan Asesor Kompetensi LSP P2 UPTP Binalavotas:
 - a. Merekrut dan menyiapkan instruktur UPTP yang memenuhi syarat sebagai calon asesor kompetensi.
 - b. Membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan asesmen kompetensi berbasis standar kompetensi kerja.
 - c. Menambah ketersediaan asesor di lingkungan lembaga pelatihan pemerintah yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja.
2. Tujuan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi (RCC):
 - a. Melakukan pemetaan dan validasi kebutuhan sertifikasi ulang asesor kompetensi LSP P2 UPTP Binalavotas.
 - b. Menyusun mekanisme pelaksanaan RCC sesuai dengan regulasi dan ketentuan masa berlaku sertifikat.
 - c. Memastikan kompetensi asesor kompetensi LSP P2 tetap relevan terhadap pembaruan standar kompetensi kerja.
 - d. Meningkatkan kesiapan asesor kompetensi dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi yang kredibel dan akuntabel di LSP P2.
3. Tujuan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Pengelola LSP P2:
 - a. Mengembangkan program pelatihan, materi pelatihan dan skema sertifikasi untuk pengelola LSP P2 sesuai dengan kerangka manajemen mutu Sertifikasi kompetensi kerja.
 - b. Merekrut peserta berdasarkan struktur organisasi LSP P2, termasuk Ketua, Manajer, Auditor, dan Administrator.
 - c. Membekali pengelola dengan kompetensi teknis dan manajerial yang diperlukan dalam tata kelola LSP sesuai pedoman BNSP.

- d. Meningkatkan kualitas layanan sertifikasi di lingkungan LSP P2 agar sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
- 4. Tujuan Pelatihan Kaji Ulang Materi Uji Kompetensi:
 - a. Menyusun desain pelatihan kaji ulang penyusunan MUK yang selaras dengan standar kompetensi kerja nasional dan kebutuhan sektor prioritas.
 - b. Meningkatkan kapasitas pengembang MUK untuk merancang perangkat uji kompetensi yang valid, reliabel, dan berbasis SIPK.
 - c. Mendorong pengembangan skema sertifikasi dan materi uji untuk sektor *emerging* dan *green jobs* yang dibutuhkan di masa depan.
 - d. Memastikan materi uji kompetensi dapat mendukung penjaminan mutu sertifikasi dan memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.

D. LUARAN PROGRAM

1. Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi LSP P2 UPTP Binalavotas.
 - a. Teridentifikasinya peserta pelatihan (instruktur) yang memenuhi kriteria calon asesor kompetensi.
 - b. Terselenggaranya pelatihan asesor kompetensi sesuai standar BNSP.
 - c. Terbitnya sertifikat kompetensi asesor bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten.
 - d. Tersedianya penambahan asesor kompetensi LSP P2 UPTP Binalaovtas di sektor prioritas pelatihan vokasi.
2. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang (RCC) Asesor Kompetensi LSP P2 UPTP
 - a. Teridentifikasinya asesor kompetensi yang membutuhkan sertifikasi ulang dalam 3 bulan sebelum dan sesudah masa berlaku habis.
 - b. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi dan pelaksanaan RCC sesuai ketentuan BNSP.
 - c. Terbitnya sertifikat kompetensi baru bagi asesor LSP P2 yang lolos proses RCC.
 - d. Tersedianya asesor kompetensi yang tetap kompeten dan terkini terhadap perubahan standar kompetensi kerja.

3. Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pengelola LSP P2
 - a. Tersusunnya program pelatihan, materi/modul pelatihan dan skema sertifikasi pengelola LSP sesuai struktur manajemen mutu LSP.
 - b. Teridentifikasinya pengelola LSP P2 yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi.
 - c. Terselenggaranya pelatihan teknis dan manajerial bagi pengelola LSP (Ketua, Manajer Manajemen Mutu, Manajer Sertifikasi, Manajer Administrasi, Auditor Internal, Administrator).
 - d. Terbitnya sertifikat kompetensi kerja bagi pengelola LSP P2 yang lulus sertifikasi kompetensi kerja.
 - e. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme manajemen LSP P2 di lingkungan UPTP.
4. Terlaksananya Pelatihan Kaji Ulang Materi Uji Kompetensi (MUK) untuk Sektor Prioritas, *Emerging*, dan kebutuhan pekerjaan di masa depan.
 - a. Tersusunnya panduan teknis kaji ulang penyusunan MUK berbasis standar kompetensi kerja nasional dan SIPK.
 - b. Teridentifikasinya sektor prioritas dan emerging yang memerlukan pengembangan MUK.
 - c. Terselenggaranya pelatihan kaji ulang penyusunan MUK bagi tim pengembang dari berbagai sektor.
 - d. Tersusunnya *draft* materi uji kompetensi baru yang relevan dan valid (unit kerja, soal, panduan pengujian, formulir asesmen).
 - e. Tersedianya MUK yang mendukung implementasi skema sertifikasi baru dan yang ditingkatkan kualitasnya.

E. FASILITAS YANG DISEDIAKAN

- a. Fasilitas yang disediakan pemberi kerja antara lain :
 1. Ruang Meeting
 2. Ruang Serbaguna / Aula / Ruang Kelas
 3. Asrama untuk peserta
- b. Fasilitas yang disediakan calon penyedia antara lain :
 1. ATK dan Komputer Supplies
 2. Spanduk

3. Perlengkapan Peserta
4. Laptop

F. PENGADAAN PPA

1. Maksud Pengadaan PPA

Melakukan dukungan administrasi, menyediakan kebutuhan bahan pendukung pelatihan asesor kompetensi, peningkatan kapasitas dan sertifikasi ulang asesor kompetensi, workshop penyusunan program pelatihan, materi pelatihan dan skema sertifikasi pengelola LSP, pembayaran honorarium dan pengelolaan perjalanan dinas dalam pelaksanaan dalam ruang lingkup program Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara efisien dan efektif.

2. Tujuan Pengadaan PPA

- a. Mengelola administrasi kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja;
- b. Mengelola administrasi kebutuhan bahan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja;
- c. Mengelola administrasi dan pembayaran honorarium master asesor pengajar, master asesor penguji dan narasumber kegiatan; dan
- d. Mengelola administrasi dan pembiayaan perjalanan dinas Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja.

3. Sasaran Pengadaan PPA

Sasaran Pengadaan PPA antara lain:

- a. Terlaksananya kegiatan persiapan penyelenggaraan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja;

- b. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja; dan
- c. Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja.

4. Lingkup Pekerjaan PPA

a. Tugas dan Tanggungjawab

- 1) Mengelola Administrasi dan Belanja Bahan, PPA bertanggungjawab mengelola administrasi dan menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - a) Penyediaan Snack dan Makan Rapat (Konsumsi kegiatan pendidikan dan pelatihan), peserta, master asesor pengajar, master asesor penguji, narasumber selama penyelenggaraan kegiatan;
 - b) Pembelian Alat Tulis Kantor untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;
 - c) Pembelian Komputer Supplies untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;
 - d) Pembuatan Spanduk;
 - e) Pembelian Perlengkapan Peserta; dan
 - f) Menyediakan Bahan Pelatihan yang dibutuhkan disesuaikan dengan program pelatihan.
- 2) Mengelola Administrasi dan Pembayaran honorarium, PPA bertanggung jawab mengelola dan pembiayaan honorarium antara lain:
 - a) Mengelola administrasi dan pembayaran honorarium penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan;
 - b) Mengelola administrasi dan pembayaran honorarium Narasumber dan/atau Master Asesor Pengajar; dan
 - c) Mengelola administrasi dan pembayaran honorarium Master Asesor Penguji.
- 3) Mengelola Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas, PPA bertanggungjawab mengelola administrasi dan pembiayaan perjalanan dinas, yang meliputi:

- a) Mengelola Administrasi dan Pembayaran Uang Harian, Transportasi (tiket pesawat, perjalanan darat dan moda transportasi lainnya) dan Penginapan Perjalanan dinas Pegawai dan peserta kegiatan;
- b) Mengelola Administrasi dan Pembayaran Uang Harian, Transportasi (tiket pesawat, perjalanan darat dan moda transportasi lainnya) dan Penginapan Perjalanan dinas Narasumber, Master Asesor Pengajar dan/atau Master Asesor Penguji;
- c) Mengelola Administrasi dan Pembiayaan Uang Harian dan Transportasi (tiket pesawat, perjalanan darat dan moda transportasi lainnya) peserta kegiatan yang berasal dari LSP P2 UPT Binalavotas; dan
- d) Mengelola Administrasi dan Pembiayaan Uang Harian panitia daerah.

b. Tenaga Pendukung Manajemen (Staff)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, PPA wajib menyediakan dukungan berupa staff administrasi yang berasal dari internal Perusahaan ataupun tenaga lokal di setiap lokasi kegiatan sebanyak 2 (dua) orang dengan tugas melaksanakan persiapan administrasi kegiatan, persiapan logistik, pelaksanaan administrasi kegiatan, logistik pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan kegiatan.

5. Kualifikasi Perusahaan

- a. Kualifikasi calon penyedia antara lain memiliki pengalaman sebagai Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) sekurang – kurangnya 1 (satu) pengalaman dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan nilai pekerjaan minimal Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) serta belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak Nonperformance akibat wanprestasi yang sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

b. Kualifikasi Personil

Personil	Jumlah	Pendidikan dan Pengalaman	Ruang Lingkup Tugas
Manajer Program	1 Orang	• S1 Semua Jurusan • Berpengalaman minimal 3 tahun menangani pekerjaan yang sama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari semua aspek dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. • Memiliki sertifikat kompetensi kerja bidang MICE skema sertifikasi venue Manajemen dari LSP yang terlisensi BNSP;	• Mengkoordinasikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/laporan naratif seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan per kelas peserta pelatihan. • Melakukan koordinasi dengan PMU, PIU, dan para pemangku kepentingan kegiatan. • Melakukan koordinasi dengan Ketua LSP P2 • Melakukan pertemuan setiap akhir bulan dengan PMU/PIU untuk menyampaikan laporan kemajuan • Membuat Laporan Konsolidasi Kegiatan kepada PMU/PIU dilengkapi dengan Laporan Keuangan.
Manager Keuangan	1 orang	• S1 Jurusan Akuntansi • Berpengalaman minimal 3 tahun menangani pekerjaan yang sama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, invoicing terutama administrasi keuangan program pemerintah.	• Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan, pelaporan, dan invoicing dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan; • Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen setiap transaksi; • Membuat Rekapitulasi hasil verifikasi sebagai bahan Laporan PPA ke PMU/PIU; • Berkoordinasi aktif dengan PMU dalam penyajian laporan keuangan yang baik. • Memastikan setiap laporan keuangan selaras dengan laporan kegiatan,

			disajikan secara baik, berpedoman pada Panduan yang ditetapkan oleh PMU/PIU dan standar regulasi keuangan pemerintah.
Manajer Logistik Officer	1 orang	• S1 Semua Jurusan • Berpengalaman minimal 3 tahun menangani pekerjaan yang sama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari semua aspek dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. • Harus memiliki sertifikat kompetensi kerja bidang MICE skema sertifikasi logistik acara dari LSP yang terlisensi BNSP;	• Melakukan koordinasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/laporan naratif seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan per kelas peserta pelatihan. • Memastikan setiap rangkaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BNSP, • Melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk verifikasi dokumen administrasi, daftar hadir, laporan hasil pelatihan, dan rekaman asesmen kompetensi bila ada. • Memastikan setiap laporan kegiatan selaras dengan laporan kegiatan, disajikan secara baik, berpedoman pada Panduan yang ditetapkan oleh PMU/PIU, BNSP dan standar regulasi keuangan pemerintah. • Berkoordinasi aktif dengan PMU/PIU dalam penyajian pelaporan kegiatan yang baik.

6. Periode Kontrak dan Pelaporan

a. Periode Kontrak

Periode kontrak terhitung dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Perjanjian Kerja antara PPA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat BNSP dengan durasi waktu 21 (dua puluh satu) Bulan (tahun jamak).

b. Pelaporan Bukti Pembayaran

PPA wajib menyediakan laporan dan bukti pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pelaporan

1) Laporan Pendahuluan (Inception Report)

Laporan pendahuluan diserahkan kepada Sekretariat BNSP paling lambat 1 minggu setelah penandatangan kontrak. Laporan pendahuluan sekurang kurangnya memuat gambaran umum rencana pelaksanaan pekerjaan, kendala-kendala awal yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja.

2) Laporan Kegiatan

Laporan pendahuluan diserahkan kepada Sekretariat BNSP paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan setiap kegiatan. Laporan kegiatan mengacu pada NSPK sesuai dengan ketentuan BNSP.

3) Laporan 3 bulanan

Laporan triwulan memuat semua informasi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dan penyampaian target pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Sekretariat BNSP paling lambat minggu pertama pada bulan ke 4 (empat) di akhir bulan ketiga tiap triwulan. Isi laporan triwulan meliputi perkembangan pelaksanaan pekerjaan, penanganan masalah dan capaian target sesuai dengan panduan umum.

4) Laporan Tahunan

Laporan tahunan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan satu tahun sebelumnya disampaikan kepada Sekretariat BNSP pada awal tahun berikutnya dari tahun pelaksanaan. Laporan ini memuat hasil perkembangan pelaksanaan program selama satu tahun. Draft laporan

tahunan diterima paling lambat pada tanggal 31 pada akhir tahun kontrak.

Laporan disusun dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, termasuk ringkasan laporan. PPA wajib menggandakan laporan dalam 5 (lima) eksemplar baik ringkasan laporan maupun laporan tahunan, dan disampaikan kepada Sekretariat BNSP yang menandatangani kontrak kerja PPA maupun kepada World Bank.

7. Lokasi Kegiatan

Area kerja sesuai dengan lokasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional yang meliputi lokasi kegiatan di LSP P2 UPTP Binalavotas, UPTP Baru/Satuan Pelayanan Binalavotas sesuai yang tercantum pada tabel berikut:

Tahun 2025

No	Lokasi	Provinsi	Jumlah Peserta
I	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)		217
1	RCC LSP P2 BBPVP Bekasi Kelas A	Jawa Barat	24
2	RCC LSP P2 BBPVP Bekasi Kelas B	Jawa Barat	23
3	RCC LSP P2 BBPVP Serang	Banten	16
4	RCC LSP P2 BBPVP Makassar Kelas A	Sulawesi Selatan	24
5	RCC LSP P2 BBPVP Makassar Kelas B	Sulawesi Selatan	9
6	RCC LSP P2 BPVP Aceh Kelas A	Banda Aceh	24
7	RCC LSP P2 BPVP Aceh Kelas B	Banda Aceh	11
8	RCC LSP P2 BPVP Padang Kelas A	Sumatera Barat	24
9	RCC LSP P2 BPVP Padang Kelas B	Sumatera Barat	11
10	RCC LSP P2 BPVP Samarinda	Kalimantan Timur	24
11	RCC LSP P2 BPVP Ambon	Maluku	8
12	RCC LSP P2 BPVP Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	17
II	Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi (ASKOM)		111
13	ASKOM LSP P2 BBPVP Bekasi	Jawa Barat	24
14	ASKOM LSP P2 BBPVP Bandung	Jawa Barat	24
15	ASKOM LSP P2 BBPVP Makassar	Sulawesi Selatan	19
16	ASKOM LSP P2 BBPVP Surakarta	Jawa Tengah	20
17	ASKOM LSP P2 BBPVP Samarinda	Kalimantan Timur	24

Tahun 2026

No	Lokasi	Provinsi	Jumlah Peserta
I	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)		463
1	RCC LSP P2 BBPVP Bandung	Jawa Barat	6
2	RCC LSP P2 BBPVP Serang Kelas A	Banten	24
3	RCC LSP P2 BBPVP Serang Kelas B	Banten	24
4	RCC LSP P2 BBPVP Serang Kelas C	Banten	24
5	RCC LSP P2 BBPVP Serang Kelas D	Banten	12
6	RCC LSP P2 BBPVP Semarang Kelas A	Jawa Tengah	24
7	RCC LSP P2 BBPVP Semarang Kelas B	Jawa Tengah	24
8	RCC LSP P2 BBPVP Semarang Kelas C	Jawa Tengah	8
9	RCC LSP P2 BBPVP Makassar Kelas A	Sulawesi Selatan	24
10	RCC LSP P2 BBPVP Makassar Kelas B	Sulawesi Selatan	10
11	RCC LSP P2 BPVP Padang	Sumatera Barat	15
12	RCC LSP P2 BPVP Surakarta Kelas A	Jawa Tengah	20
13	RCC LSP P2 BPVP Surakarta Kelas B	Jawa Tengah	20
14	RCC LSP P2 BPVP Surakarta Kelas C	Jawa Tengah	21
15	RCC LSP P2 BPVP Surakarta	Jawa Tengah	12
16	RCC LSP P2 BPVP Kendari	Sulawesi Tenggara	20
17	RCC LSP P2 BPVP Ternate Kelas A	Maluku Utara	24
18	RCC LSP P2 BPVP Ternate Kelas B	Maluku Utara	23
19	RCC LSP P2 BPVP Ambon Kelas A	Maluku	20
20	RCC LSP P2 BPVP Ambon Kelas B	Maluku	6
21	RCC LSP P2 BPVP Sorong	Papua Barat	22
22	RCC LSP P2 BPVP Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	20
23	RCC LSP P2 BPVP Bantaeng	Sulawesi Selatan	10
24	RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo Kelas A	Jawa Timur	20
25	RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo Kelas B	Jawa Timur	8
26	RCC LSP P2 BPVP Banyuwangi	Jawa Timur	20
27	RCC LSP P2 BPVP Pangkep	Sulawesi Selatan	12
II	Workshop Penyusunan Program Pelatihan, Materi Pelatihan dan Skema Sertifikasi Pengelola LSP	Jawa Barat	40

Tahun 2027

No	Lokasi	Provinsi	Jumlah Peserta
II	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)		177
1	RCC LSP P2 BBPVP Makassar Kelas A	Sulawesi Selatan	20
2	RCC LSP P2 BBPVP Makassar Kelas B	Sulawesi Selatan	6
3	RCC LSP P2 BPVP Surakarta Kelas A	Jawa Tengah	22
4	RCC LSP P2 BPVP Surakarta Kelas B	Jawa Tengah	21
5	RCC LSP P2 BPVP Ambon	Maluku	3
6	RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo Kelas A	Jawa Timur	22
7	RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo Kelas B	Jawa Timur	11
8	ASKOM LSP P2 Kelas A	Jawa Barat	24
9	ASKOM LSP P2 Kelas B	Jawa Barat	24
10	ASKOM LSP P2 Kelas C	Jawa Barat	24
II	Pelatihan Kaji Ulang Materi Uji Kompetensi (MUK)	Jawa Barat	60

G. Sumber Pendanaan

Pembiayaan PPA dibebankan pada APBN melalui DIPA Sekretariat BNSP, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas bersumber dari PHLN Labor Market Information and Skills System for Labor Market Flexibility (LISTRAF) dengan sistem Kontrak Tahun Jamak, bersumber dari PHLN *Loan* Listraf (IBRD Loan Number 9636-ID).

H. Hak Kepemilikan Data Proyek

Semua dokumen laporan termasuk data yang disusun selama pelaksanaan pekerjaan oleh PPA merupakan bagian dari aset Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, PPA wajib mempersiapkan secara memadai dan akurat, memanfaatkan dan memelihara serta menyimpan dalam MIS data base, untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Sekretariat BNSP yang menandatangani kontrak kerja PPA.

I. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun untuk menjadi pedoman pengadaan dan kontrak kerja PPA Kegiatan Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Kerja, dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan kesepakatan dengan pihak Bank Dunia.

LAMPIRAN 1 : Rencana Pelaksanaan Subkomponen B.2.5. Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TANGGAL NAMA BALAI	Bulan 1					Bulan 2					Bulan 3					KETERANGAN
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)	LSP P2 BBPVP Bekasi (Kelas A)																
2		LSP P2 BBPVP Bekasi (Kelas B)																
3		LSP P2 BBPVP Serang																
4		LSP P2 BBPVP Makassar (Kelas A)																
5		LSP P2 BBPVP Makassar (kelas B)																
6		LSP P2 BPVP Samarinda																
7		LSP P2 BPVP Ambon																
8		LSP P2 BPVP Aceh (Kelas A)																
9		LSP P2 BPVP Aceh (Kelas B)																
10		LSP P2 BPVP Padang (Kelas A)																
11		LSP P2 BPVP Padang (Kelas B)																
12		LSP P2 BPVP Lombok Timur																
13	Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi (ASKOM)	LSP P2 BBPVP Makassar																
14		LSP P2 BBPVP Bandung																
15		LSP P2 BBPVP Bekasi																
16		LSP P2 BPVP Surakarta																
17		LSP P2 BPVP Samarinda																

LAMPIRAN 2 : Rencana Pelaksanaan Subkomponen B.2.5. Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Tahun 2026

NO	KEGIATAN	TANGGAL NAMA BALAI	JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					KETERANGAN
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)	RCC LSP P2 BBPVP Bandung																					21 - 22 Januari 2026
2		RCC LSP P2 BBPVP Serang (Kelas A)																					4 - 5 Februari 2026
3		RCC LSP P2 BBPVP Serang (Kelas B)																					11 - 12 Februari 2026
4		RCC LSP P2 BBPVP Serang (Kelas C)																					19 - 20 Februari 2026
5		RCC LSP P2 BBPVP Serang (Kelas D)																					25 - 26 Februari 2026
6		RCC LSP P2 BBPVP Semarang (Kelas A)																					4 - 5 Maret 2026
7		RCC LSP P2 BBPVP Semarang (Kelas B)																					10 - 11 Maret 2026
8		RCC LSP P2 BBPVP Semarang (Kelas C)																					25 - 26 Maret 2026
9		RCC LSP P2 BBPVP Makassar (Kelas A)																					8 - 9 April 2026
10		RCC LSP P2 BBPVP Makassar (Kelas B)																					15 - 16 April 2026
11		RCC LSP P2 BPVP Padang (Kelas A)																					21 - 22 April 2026

LAMPIRAN 2 : Rencana Pelaksanaan Subkomponen B.2.5. Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Tahun 2026

NO	KEGIATAN	TANGGAL NAMA BALAI	MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					KETERANGAN
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
12	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)	RCC LSP P2 BPVP Surakarta (Kelas A)																										6 - 7 Mei 2026
13		RCC LSP P2 BPVP Surakarta (Kelas B)																										12 - 13 Mei 2026
14		RCC LSP P2 BPVP Surakarta (Kelas C)																										19 - 20 Mei 2026
15		RCC LSP P2 BPVP Surakarta (Kelas D)																										28 - 29 Mei 2026
16		RCC LSP P2 BPVP Kendari (Kelas A)																										3 - 4 Juni 2026
17		RCC LSP P2 BPVP Ternate (Kelas A)																										10 - 11 Juni 2026
18		RCC LSP P2 BPVP Ternate (Kelas A)																										24 - 25 Juni 2026
19		RCC LSP P2 BPVP Ambon (Kelas A)																										8 - 9 Juli 2026
20		RCC LSP P2 BPVP Ambon (Kelas B)																										15 - 16 Juli 2026
21		RCC LSP P2 BPVP Sorong																										22 - 23 Juli 2026
22		RCC LSP P2 BPVP Lombok Timur																										5 - 6 Agustus 2026
23		RCC LSP P2 BPVP Bantaeng																										12 - 13 Agustus 2026
24		RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo (Kelas A)																										19 - 20 Agustus 2026
25		RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo (Kelas B)																										27 - 28 Agustus 2026
26		RCC LSP P2 BPVP Banyuwangi																										2 - 3 September 2026
27		RCC LSP P2 BPVP Pangkep																										9 - 10 September 2026

NO	KEGIATAN	TANGGAL NAMA BALAI	MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					KETERANGAN
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
28	Workshop Penyusunan Program Pelatihan, Materi Pelatihan dan Skema Sertifikasi Pengelola LSP																											31 Agustus - 4 September 2026

LAMPIRAN 3 : Rencana Pelaksanaan Subkomponen B.2.5. Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Tahun 2027

NO	KEGIATAN	TANGGAL	JANUARI					FEBRUARI					MARET					KETERANGAN
		NAMA BALAI	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Ulang Asesor Kompetensi/ Recognition Current Competency (RCC)	RCC LSP P2 BBPVP Makassar (Kelas A)																19 - 20 Januari 2027
2		RCC LSP P2 BBPVP Makassar (Kelas B)																26 - 27 Januari 2027
3		RCC LSP P2 BPVP Surakarta (Kelas A)																9 - 10 Februari 2027
4		RCC LSP P2 BPVP Surakarta (Kelas B)																16 - 17 Februari 2027
5		RCC LSP P2 BPVP Ambon																2 - 3 Maret 2027
6		RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo (Kelas A)																16 - 17 Maret 2027
7		RCC LSP P2 BPVP Sidoarjo (Kelas B)																6 - 7 April 2027

LAMPIRAN 3 : Rencana Pelaksanaan Subkomponen B.2.5. Peningkatan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Berbasis Sistem Informasi Pasar Tahun 2027

N O	KEGIATAN	TANGGAL NAMA BALAI	APRIL					MEI					JUNI					JULI					KETERANGA N
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
8	Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi (ASKOM)	ASKOM LSP P2 (KELAS A)																					11 - 12 Mei 2027
9		ASKOM LSP P2 (KELAS B)																					8 - 9 Juni 2027
10		ASKOM LSP P2 (KELAS C)																					8 - 9 Juli 2027
11	Pelatihan penyusunan materi uji kompetensi sektor prioritas pembangunan nasional pada skema sertifikasi yang sedang berkembang (emerging)/dibutuhkan dimasa depan	Pelatihan Penyusunan Materi Uji Kompetensi Sektor Prioritas Pembangunan Nasional pada Skema Sertifikasi yang sedang Berkembang (Emerging)/ Dibutuhkan Dimasa Depan																					7 - 9 April 2027

